



**RENCANA KERJA
TAHUN 2022**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dapat disusun.


Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam penyajian Rencana kerja ini masih belum sempurna, untuk itu diharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun guna memperbaiki dan kesempurnaan Renja ini.

Kuala Tungkal,

2021

**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**



H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19611106 198503 1 003

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD dan Pencapaian Renstra DPMD s/d Tahun 2021	8
Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD.....	17
Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	20
Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku kepentingan Tahun 2022	29
Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	34

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Daerah Tahun Lalu	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMD	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III Tujuan dan Sasaran DPMD	30
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	30
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMD.....	30
3.3. Program dan Kegiatan	31
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan DPMD	42
BAB V Penutup	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Menurut Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan;

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan rancangan akhir dan
- f. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 adalah;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, dan Validasi Pemutakhiran, Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RT/RW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah untuk menjabarkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, yang diaplikasikan melalui program dan kegiatan SKPD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja ini bertujuan untuk mempermudah pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, sedangkan pencapaian kinerja Tahun 2020 akan menjadi perbandingan dengan Rencana Kerja Tahun 2022, sehingga akan dijadikan tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 secara sistematika disajikan dan diuraikan setiap bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DPMD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DPMD

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMD

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun 2020 dan Capaian Renstra DPMD

Rencana Kerja SKPD Tahun 2022 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi SKPD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi SKPD saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang. Anggaran pada Tahun 2020 dari Pagu Awal dikurangi sebanyak 50% sebagai dampak dari Pandemi COVID 19. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja SKPD Tahun 2020 sebagai berikut;

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar berjalan dengan lancar selama 12 bulan melalui kegiatan sebagai berikut;

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan alat tulis kantor
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- l. Penyediaan iklan layanan

Program ini seluruh kegiatannya mempunyai anggaran sebesar Rp740.879.623,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp685.892.756,- atau sebesar 92,58%.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang layak guna dengan indikator persentase kecukupan sarana dan prasarana, melalui kegiatan sebagai berikut;

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program ini anggaran yang tersedia sebesar Rp212.016.000,- dilaksanakan dengan realisasi keuangan mencapai Rp203.527.040,- atau sebesar 96%.

3. Program peningkatan disiplin aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur dengan indikator persentase tingkat disiplin aparatur dilaksanakan dengan satu kegiatan yaitu pengadaan pakaian Teluk Belango dengan Anggaran Rp24.500.000,- dengan realisasi Rp24.500.000,- atau 100%.

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kinerja aparatur dengan indikator persentase ASN yang sesuai kompetensi melalui kegiatan Pengembangan SDM tidak ada anggaran.

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Tujuan program ini adalah untuk menyiapkan penyusunan rencana kerja, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dengan anggaran Rp20.541.400,- dengan realisasi Rp20.541.400,- atau 100%.

6. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

Sasaran dari program ini dengan target akhir renstra 90% lembaga kemasyarakatan yang aktif dengan capaian sebesar 61,56% atau 55,40%. dan target akhir renstra 15 desa swasembada dan capaiannya adalah 80% atau 16 Desa swasembada. Kegiatan yang dijalankan adalah;

- a. Tim pembentukan desa persiapan
 - b. Gerakan bulan bhakti gotong-royong masyarakat (BBGRM)
 - c. Pembinaan dan lomba desa/kelurahan
 - d. Pembinaan posyandu dan lingkungan bersih dan sehat
 - e. Penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan sistem keuangan desa
 - f. Peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas dalam membangun kawasan perdesaan
 - g. Perlombaan sekretariat posyantek dan alat-alat teknologi tepat guna
 - h. Pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
 - i. Pembinaan Kelompok Dasa Wisma
 - j. Penetapan Batas Desa
 - k. Pelatihan dan Pembinaan tenaga operator profil desa/kelurahan
- Seluruh kegiatan mempunyai anggaran sebesar Rp1.358.493.917,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.225.116.559,- atau sebesar 90,18%.

7. Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

Program ini mempunyai anggaran Rp33.225.000,- dengan realisasi keuangan Rp32.100.000,- atau sebesar 96,61%,

mempunyai indikator kinerja jumlah BUM desa yang aktif 61% dan BUM desa Bersama yang aktif 43% melalui kegiatan;

- a. P2WKSS
 - b. Sosialisasi pengembangan ekonomi kawasan perdesaan
 - c. Pembinaan dan pengembangan BUM desa
8. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Sasaran indikatornya partisipasi masyarakat dalam membangun desa sebesar 80%. Adapun kegiatan di program ini, yaitu;

- a. Pembinaan dan monitoring dana desa
- b. Pembinaan dan monitoring BUM desa bersama dan fasilitasi pengembangan penghidupan berkelanjutan

Program ini dapat melaksanakan realisasi keuangan sebesar 100% atau sebesar Rp57.500.000,- dari Total anggaran sebesar Rp57.500.000,-

9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Sasaran strategis program ini adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa dengan indikator kinerja jumlah desa dengan perencanaan, penganggaran, perbendaharaan dan pertanggungjawaban yang baik. Kegiatan yang ada pada program ini adalah;

- a. Fasilitasi penguatan kapasitas bendahara desa
- b. Pembinaan pengelolaan kekayaan dan aset desa
- c. Pembentukan Tim alokasi dana desa
- d. Fasilitasi penguatan Badan Permusyawaratan Desa

Program ini dapat merealisasikan keuangan sebesar Rp259.225.452,- dari total anggaran sebesar Rp242.125.452,- atau sebesar 93,40%. Berikut disajikan Tabel T-C.29;

RENCANA KERJA 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tabel T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1	2	3	4	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			8	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				5	6	7=(6/5)		9(4+6+8)	10=(9/3)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase peningkatan kuantitas lembaga kemasyarakatan	100%	91%	90%	91%	101%	90%	95%	95%
	Persentase peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan	70%	45%	60%	45%	75%	60%	60%	86%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%	49%	80%	71%	89%	70%	70%	78%

RENCANA KERJA 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kegiatan pembinaan, pemasyarakatan dan penerapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah posyantek kecamatan yang mendapatkan pembinaan	13 posyantek	13 posyantek	13 posyantek	13 posyantek	13 posyantek	100%	0	0	100%
Kegiatan perlombaan sekretariat posyantek dan alat-alat teknologi tepat guna	Terpilinya 3 sekretariat posyantek kecamatan	3 posyantek	3 posyantek	3 posyantek	3 posyantek	3 posyantek	100%	3 posyantek	3 posyantek	100%
Kegiatan Gerakan bulan bhakti gotong royong	Jumlah desa dan kelurahan terbaik pelaksanaan BBGRM	13 desa/kel.	13 desa/kel.	13 desa/kel.	13 desa/kel.	13 desa/kel.	100%	13 desa/kel.	13 desa/kel.	100%
Kegiatan pembinaan posyandu dan lingkungan bersih sehat(LBS)	Jumlah posyandu yang dibina dan dilombakan	13 posyandu desa/kel.	13 posyandu desa/kel.	13 posyandu desa/kel.	13 posyandu desa/kel.	13 posyandu desa/kel.	100%	13 posyandu desa/kel.	13 posyandu desa/kel.	100%
Kegiatan pemberdayaan kesejaherataan keluarga	Terlaksananya 10 program pokok PKK	13 kec.	13 kec.	13 kec.	13 kec.	13 kec.	100%	13 kec.	13 kec.	100%
Pembinaan kelompok dasawisma	Terpilinya 6 kelompok dasawisma terbaik Tk. Kab.	13 kec.	13 kec.	13 kec.	13 kec.	13 kec.	100%	13 kec.	13 kec.	100%
Penguatan kelembagaan komisi penanggulangan aids (KPA)	Jumlah peserta yang diundang	150 orang	0	0	0	0	0%	0	0	0

RENCANA KERJA 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penguatan kelembagaan dan sistem informasi adat budaya nusantara	Jumlah Lembaga adat yang diundang	14 Lembaga Adat	0	0	0	0%	0	0	0
Kegiatan peningkatan kapasitas kerjasama pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah BKAD yang diundang	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD	100%	13 BKAD	13 BKAD	100%
Program Peniugkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Desa Swasembada	15 Desa Swasembada	12 Desa Swasembada	14 Desa Swasembada	16 Desa Swasembada	92%	15 Desa Swasembada	16 Desa Swasembada	107%
Kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah kecamatan yang difasilitasi	13 kec.	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan penetapan batas desa	Jumlah perbup yang disusun	60 Perbup	0	20 perbup	12 perbup	0	12 perbup	21 perbup	20%
Kegiatan pelatihan dan pembinaan tenaga operator profil desa/kelurahan	Jumlah operator yang dilatih	147 orang	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan pembinaan dan lomba desa dan kelurahan	Jumlah Desa dan kelurahan terbaik	6 desa dan 6 kel.	6 desa dan 6 kel.	6 desa dan 6 kel.	6 desa dan 6 kel.	100%	6 desa dan 6 kel.	6 desa dan 6 kel.	100%

RENCANA KERJA 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kegiatan penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan Siskendes	Jumlah peserta pelatihan	254 orang	254 orang	254 orang	254 orang	254 orang	100%	254 orang	254 orang	100%
Kegiatan Tim pembentukan desa persiapan	Jumlah desa persiapan dan Kelurahan yang dievaluasi	2 desa dan 6 kelurahan	2 desa dan 6 kelurahan	2 desa dan 6 Kelurahan	2 desa dan 6 Kelurahan	2 desa dan 6 Kelurahan	100%	2 desa dan 6 Kelurahan	2 desa dan 6 Kelurahan	100%
Kegiatan evaluasi pemilihan kepala desa	terpilihnya kepala desa definitif	114 kades	114 kades	0	0	0	0%	0	114 kades	100%
	Persentase peningkatan kuantitas BUM desa	100%	91%	100%	99%	99%	99%	100%	100%	100%
	Persentase peningkatan kuantitas BUM desa bersama di setiap kecamatan	100%	46%	85%	54%	64%	64%	85%	85%	85%
	Persentase peningkatan kualitas BUM desa	35%	0%	33%	22%	67%	67%	35%	30%	86%
	Persentase peningkatan kualitas BUM desa bersama	35%	0%	30%	33%	110%	110%	30%	30%	86%
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase BUM desa dan BUM desa bersama yang aktif	70%	63%	68%	37%	54%	54%	65%	65%	93%
Kegiatan pembinaan P2WKSS	Jumlah peserta pelatihan	500 orang/10 desa & kel.	300 orang/6 desa & kel.	100 orang/2 desa & kel.	0	0%	0%	0	0	60%
Kegiatan pembinaan dan pengembangan BUM desa	Jumlah desa yang dibina	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	100%	100%	114 desa	114 desa	100%

RENCANA KERJA 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kegiatan fasilitasi manajemen kelompok usaha masyarakat kawasan pedesaan	Jumlah kelompok usaha yang difasilitasi	12 kelompok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Sosialisasi pengembangan ekonomi kawasan pedesaan	Jumlah kecamatan yang ikut sosialisasi	13 kec.	13 kec.	13 kec.	13 kec.	13 kec.	100%	0	0	0	0	0	100%
Kegiatan Pembinaan dan monitoring pengembangan ekonomi kawasan pedesaan	Jumlah kecamatan yang dibina	13 kec	0	0	0	0	0	13 kec.	13 kec.	13 kec.	100%	80%	100%
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase Jumlah desa maju	15%	4%	10%	11%	110%	15%	12%	80%	100%	80%	100%	100%
Kegiatan pembinaan, monitoring serta pendampingan dana desa	Jumlah desa yang menerima dana desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	100%	114 desa	114 desa	114 desa	100%	114 desa	100%	100%
Kegiatan pembinaan dan monitoring BUM desa bersama dan fasilitasi pengembangan kehidupan berkelanjutan	Jumlah kecamatan yang diundang	13 kec	13 kec.	0	0	0%	0	0	0	0%	0	100%	100%

RENCANA KERJA 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kegiatan sosialisasi dan monitoring BUM desa bersama	Jumlah kecamatan yang disosialisasikan	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	100%	13 Kec.	13 Kec.	100%
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah desa dengan perencanaan, penganggaran, pendanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang baik	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	100%	114 desa	114 desa	114 desa	100%	
Kegiatan pembinaan penyusunan RPJMDes, RKPDDes dan APBDDes	Jumlah desa yang telah melakukan penyusunan RPJMDes, RKPDDes dan APBDDes	114 desa	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
Kegiatan Fasilitasi penguatan kapasitas kepala desa	Jumlah peserta penguatan kapasitas kepala desa	114 kades	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
Kegiatan Fasilitasi penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta penguatan kapasitas BPD	114 BPD	114 BPD	0	0	0	0	0%	114 BPD	114 BPD	114 BPD	100%	
Kegiatan Fasilitasi penguatan kapasitas perangkat desa	Jumlah peserta penguatan kapasitas perangkat desa	114 desa	114 BPD	0	0	0	0	0%	114 desa	114 desa	114 desa	100%	
Kegiatan Fasilitasi penguatan kapasitas bendahara desa	Jumlah peserta penguatan kapasitas perangkat desa	114 bend. desa	0	114 bend. desa	114 bend. desa	114 bend. desa	114 bend. desa	100%	114 bend. Desa	114 bend. Desa	114 bend. Desa	100%	

RENCANA KERJA 2022

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kegiatan fasilitasi penguatan kapasitas aparaturn pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah peserta	72 desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Kades yang dibina	114 kades	0	114 kades	114 kades	114 kades	100%	0	0	0	0	0	100%
Kegiatan Penyusunan peraturan pemerintahan desa	dokumen tata pemerintahan desa	2 dokumen	0	2 dokumen	2 dokumen	100%	0	0	0	0	0	0	100%
Kegiatan Pembinaan, pengelolaan kekayaan dan aset desa	Jumlah desa yang dibina	114 desa	114 desa	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%
Kegiatan Pembentukan tim pengelola anggaran dana desa	Jumlah desa yang menerima alokasi dana desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	100%	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	100%
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa dengan administrasi keuangan dan aset yang tertata	114 desa	114 desa	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%
Kegiatan Pembinaan, pengelolaan kekayaan dan aset desa	Penataan adm keuangan dan aset desa	114 desa	114 desa	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%

RENCANA KERJA 2022

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kegiatan Pembentukan tim pengelola alokasi dana desa	penyaluran alokasi dana desa	114 desa	114 desa	0	0	0%	0	0	100%
---	---------------------------------	----------	----------	---	---	----	---	---	------

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMD

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintah Kabupaten dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyelenggarakan fungsi;

- a. Perumusan kebijakan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut penyajian analisis pencapaian kinerja perangkat daerah pada Tabel T-C.30;

RENCANA KERJA 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
1.	Persentase peningkatan kuantitas lembaga kemasyarakatan			60%	70%	80%	90%	100%	60%	70%	90%	90%	100%		
2.	Persentase peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan			30%	40%	50%	60%	70%	30%	40%	45%	60%	70%		
3.	Persentase jumlah desa maju (status desa)			3,51%	3,51%	5%	10%	15%	3,51%	11,40%	11,40%	14%	15%		

RENCANA KERJA 2022

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

4.	Persentase peningkatan kuantitas BUM desa			76,32%	91,23%	95%	100%	100%	76,32%	91,23%	96,49%	100%	100%	
5.	Persentase peningkatan kuantitas BUM desa bersama			15,39%	46,15%	70%	85%	100%	15,39%	53,85%	54%	85%	100%	
6.	Persentase peningkatan kualitas BUM desa			0%	0%	30%	33%	35%	0%	0%	22%	33%	35%	
7.	Persentase peningkatan kualitas BUM desa bersama			0%	0%	25%	30%	35%	0%	0%	33,33%	34%	35%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD

Untuk menuju masyarakat desa yang mandiri, DPMD perlu mengangkat isu-isu kembali faktor-faktor pelayanan yang merupakan permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari gambaran pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- A. Faktor Penghambat :
 - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah
 - b. Terbatasnya sarana prasarana di Desa
 - c. Terbatasnya kemampuan anggaran SKPD untuk pelaksanaan program
 - d. Tingkat pengetahuan SDM yang relatif masih rendah
 - e. Tingginya tingkat kemiskinan keluarga
- B. Faktor Pendorong :
 - a. Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum
 - b. Adanya kelembagaan yang tupoksinya terkait dengan bidang kegiatan yang ditangani
 - c. Tersedianya potensi dengan sumber daya strategis yang cukup
 - d. Adanya komitmen untuk mendukung program dan kegiatan
 - e. Adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan
 - f. Adanya Bantuan Dana dan program dari Pemerintah ke Desa

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Berita Acara Forum OPD, dari rancangan awal total pagu Rp9.048.150.000,- menjadi Rp9.183.635.000,- dengan adanya penambahan pada sub kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa menjadi Rp1.485.485.000,-. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp450.000.000,- dengan pertimbangan kurangnya perjalanan dinas untuk melakukan pembinaan ke desa dan penetapan batas desa dengan target 40 perbup.

RENCANA KERJA 2022

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tabel T-C. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPDP Tahun 2022
Kabupaten Tanjunga Jabung Barat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Rancangan Awal RKPDP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)				
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
												Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	80		
												Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	80		
01.2.01	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah jenis laporan tahunan yang disusun	6	dokumen	45.000.000	Rp	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah jenis laporan tahunan yang disusun	6	dokumen	40.200.000	Rp	
															5%
			Nilai SAKIP DPMID	65				Nilai SAKIP DPMID	65						

**RENCANA KERJA
2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

01.2.01.06	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPMD Kab. Tanjabbra	Jumlah laporan yang disusun	6 dokumen tahun dan 8 laporan triwulan	45.000.000 Rp	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPMD Kab. Tanjabbra	Jumlah laporan yang disusun	6 dokumen tahunan dan 8 laporan triwulan	40.200.000 Rp	
01.2.02	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase Tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan	100%	3.535.000.000 Rp	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase Tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan	100%	3.489.546.448 Rp	
01.2.02.01	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DPMD Kab. Tanjabbra	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	3.385.000.000 Rp	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DPMD Kab. Tanjabbra	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	3.339.546.948 Rp	
01.2.02.02	Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	DPMD Kab. Tanjabbra	Jumlah pembayaran honorarium pegawai	12 Bulan	150.000.000 Rp	Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	DPMD Kab. Tanjabbra	Jumlah pembayaran honorarium pegawai	12 Bulan	149.999.500 Rp	
01.2.05	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase peningkatan disiplin pegawai	100%	37.950.000 Rp	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase peningkatan disiplin pegawai	100%	20.400.000 Rp	
01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	DPMD Kab. Tanjabbra	Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	51 stel	22.950.000 Rp	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	DPMD Kab. Tanjabbra	Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	51 stel	20.400.000 Rp	
01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	DPMD Kab. Tanjabbra	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	3 orang	15.000.000 Rp	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	DPMD Kab. Tanjabbra	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	3 orang	- Rp	

**RENCANA KERJA
2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

01.02.06	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah		Persentase cakupan layanan administrasi umum	100%	Rp 566.200.000	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah		Persentase cakupan layanan administrasi umum	100%	Rp 509.885.290	
01.02.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMD Kab. Tanjabbra	Jumlah lamanya ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Rp 7.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMD Kab. Tanjabbra	Jumlah lamanya ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Rp 2.933.599	
01.02.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPMD Kab. Tanjabbra	Jumlah lamanya ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Rp 44.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPMD Kab. Tanjabbra	Jumlah lamanya ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Rp 43.999.422	
01.02.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	DPMD Kab. Tanjabbra	Jumlah bahan logistik kantor	1200 kotak	Rp 20.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	DPMD Kab. Tanjabbra	Jumlah bahan logistik kantor	1200 kotak	Rp 17.850.000	
01.02.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMD Kab. Tanjabbra	Jumlah lamanya ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Rp 41.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMD Kab. Tanjabbra	Jumlah lamanya ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Rp 40.341.719	
01.02.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMD Kab. Tanjabbra	Jumlah bahan bacaan	1050 exemplar	Rp 4.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMD Kab. Tanjabbra	Jumlah bahan bacaan	1050 exemplar	Rp 4.200.000	
01.02.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DPMD Kab. Tanjabbra	Jumlah lamanya ketersediaan dana koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	Rp 450.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DPMD Kab. Tanjabbra	Jumlah lamanya ketersediaan dana koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	Rp 400.560.550	

RENCANA KERJA 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

01.02.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase peningkatan kenyamanan kantor	100%	Rp 81.500.000	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase peningkatan kenyamanan kantor	100%	Rp 79.974.306	
01.02.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	DPMD Kab. Tanjabbaf	Jumlah materai yang tersedia	150 lembar	Rp 1.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	DPMD Kab. Tanjabbaf	Jumlah materai yang tersedia	150 lembar	Rp 1.440.000	
01.02.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	DPMD Kab. Tanjabbaf	Jumlah pembayaran air, listrik dan telepon	12 Bulan	Rp 65.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	DPMD Kab. Tanjabbaf	Jumlah pembayaran air, listrik dan telepon	12 Bulan	Rp 63.600.000	
01.02.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DPMD Kab. Tanjabbaf	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Rp 15.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DPMD Kab. Tanjabbaf	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Rp 14.934.306	
01.02.09	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100%	Rp 157.500.000	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100%	Rp 125.637.800	
01.02.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPMD Kab. Tanjabbaf	Terpeliharanya kendaraan dinas	3 unit mobil dan 10 unit motor	Rp 120.000.000	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPMD Kab. Tanjabbaf	Terpeliharanya kendaraan dinas	3 unit mobil dan 10 unit motor	Rp 96.207.800	

RENCANA KERJA 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

01.02.09.06	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	DPMD Kab. Tanjabbat	Terpeliharanya peralatan kantor	40 unit	Rp 7.500.000	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	DPMD Kab. Tanjabbat	Terpeliharanya peralatan kantor	40 unit	Rp 7.430.000	
01.02.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	DPMD Kab. Tanjabbat	Terpeliharanya gedung kantor	3 unit	Rp 30.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	DPMD Kab. Tanjabbat	Terpeliharanya gedung kantor	3 unit	Rp 22.000.000	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				Rp 4.760.485.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				Rp 3.281.086.252	
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa		Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi	13 BKAD	Rp 150.000.000	Program Peningkatan Kerjasama Desa		Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi	13 BKAD	Rp 37.548.818	
2.13.03.2.01	Kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa dalam Kabupaten/kota	Kab. Tanjabbat	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya	114 Desa	Rp 150.000.000	Kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa dalam Kabupaten/kota	Kab. Tanjabbat	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya	114 Desa	Rp 37.548.818	
2.13.03.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi pembangunan kawasan pedesaan	Kab. Tanjabbat	Jumlah perbup Kawasan pedesaan yang disusun	1 dokumen	Rp 150.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi pembangunan kawasan pedesaan	Kab. Tanjabbat	Jumlah perbup Kawasan pedesaan yang disusun	1 dokumen	Rp 37.548.818	

**RENCANA KERJA
2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	114 Desa	Rp 3.020.485.000	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	114 Desa	Rp 2.142.862.528	
2.13.04-2.01	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya	114 Desa	Rp 3.020.485.000	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya	114 Desa	Rp 2.142.862.528	
2.13.04-2.01.04	Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya	114 desa	Rp 300.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya	114 desa	Rp 150.450.000	
2.13.04-2.01.05	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparaturn pemerintahan desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah aparaturn desa yang dibina	171 orang	Rp 495.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparaturn pemerintahan desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah aparaturn desa yang dibina	171 orang	Rp 71.568.918	
2.13.04-2.01.08	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah BUM desa yang dibina	114 BUM desa	Rp 240.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM desa dan Lembaga kerjasama antar desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah BUM desa yang dibina	114 BUM desa	Rp 72.065.000	

RENCANA KERJA 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04. 2.01.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa yang mengadakan Pilkades	43 Desa	Rp 1.485.485.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa yang mengadakan Pilkades	43 Desa	Rp 1.465.778.610	
2.13.04. 2.01.11	Sub Kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan profilnya	114 desa	Rp 100.000.000	Sub Kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan profilnya	114 desa	Rp 59.900.000	
2.13.04. 2.01.13	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan aset desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolannya asetya	114 desa	Rp 100.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan aset desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolannya asetya	114 desa	Rp 60.450.000	
2.13.04. 2.01.15	Sub Kegiatan Fasilitasi penetapan dan penegeasan batas desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah perbu batas desa yang disusun	40 perbup	Rp 200.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi penetapan dan penegeasan batas desa	Kab. Tanjab Barat	Jumlah perbu batas desa yang disusun	40 perbup	Rp 165.800.000	
2.13.04. 2.01.18	Sub Kegiatan Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan keurahan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa yang dievaluasi perkembangan dan lomba	114 desa	Rp 100.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba dan keurahan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa yang dievaluasi perkembangan dan lomba	114 desa	Rp 96.850.000	

RENCANA KERJA 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan Kelurahan yang diberdayakan	100%	Rp 1.590.000.000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan Kelurahan yang diberdayakan	100%	Rp 1.100.674.906	
2.13.05.2.01	Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah PKK dan Posyandu yang diberdayakan	422	Rp 1.590.000.000	Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah PKK dan Posyandu yang diberdayakan	422	Rp 1.100.674.906	

**RENCANA KERJA
2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

2.13.05. 2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/keurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna), Lembaga adat desa/keurahan dan Masyarakat hukum adat	Kab. Tanjab Barat	Pembinaan locus desa stunting dan KKS (Kabupaten Kota Sehat)	40 desa	Rp 120.000.000	Sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/keurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna), Lembaga adat desa/keurahan dan Masyarakat hukum adat	Kab. Tanjab Barat	Pembinaan locus desa stunting dan KKS (Kabupaten Kota Sehat)	40 desa	Rp 85.550.000	
		Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa yang difasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	114 desa	Rp 140.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa yang difasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	114 desa	Rp 67.100.000	
2.13.05. 2.01.07	Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa / Kelurahan terbaik dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	6 desa/kelurahan	Rp 100.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Tanjab Barat	Jumlah desa / Kelurahan terbaik dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	6 desa/kelurahan	Rp 48.025.000	

RENCANA KERJA 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.05. 2.01.09	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Kab. Tanjung Barat	Tertindakannya 10 program pokok PKK	12 Bulan	Rp 900.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Kab. Tanjung Barat	Tertindakannya 10 program pokok PKK	12 Bulan	Rp 899.999.906
---------------------	---	--------------------	-------------------------------------	----------	----------------	---	--------------------	-------------------------------------	----------	----------------

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pokok Pikiran Anggota DPRD				

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMD

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penjabaran dari RPJM Nasional bagi setiap Kementerian/Lembaga adalah dalam bentuk visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif, penjabaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dalam bentuk Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 2 (dua) Kementerian/Lembaga, yaitu :

1. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2. Kementerian Dalam Negeri

Kemudian yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempengaruhi permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi adalah sebagai berikut :

Faktor Penghambat yaitu :

1. Masih kurangnya kapasitas SDM
2. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana

Faktor Pendorong, yaitu;

1. Adanya bantuan keuangan dari pemerintah
2. Adanya SDA dan SDM yang banyak
3. Adanya peraturan dari pemerintah

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan capaian target kinerja tahun lalu untuk dijadikan sebagai pedoman untuk penyusunan rencana kerja tahun berikutnya. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan misi, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Dengan demikian tujuan disusunnya rencana kerja ini adalah untuk memperjelas pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tujuan dan sasaran serta untuk mencapai misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penataan desa
- b. Meningkatnya kerjasama yang dilakukan oleh desa
- c. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi aparatur pemerintahan desa.
- d. Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja DPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah merupakan bagian dari sistem manajemen perencanaan pembangunan partisipatif yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Program dan kegiatan sudah berdasarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050 3708 Tahun 2020.

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung barat yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah untuk pencapaian tujuan dan sasaran, kemudian dengan memperhatikan beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi. Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain, Keterbatasan anggaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, belum semua program dan kegiatan terintegrasi dengan baik, masih lemahnya pemahaman aparatur pelaksana di desa terkait tata kelola keuangan dan pembangunan desa serta penerapan Teknologi Tepat Guna, partisipasi dan kemandirian masyarakat belum optimal yang disebabkan semakin lunturnya budaya gotong royong, terbatasnya tenaga pemberdayaan masyarakat dan belum optimalnya koordinasi antar Instansi terkait, maka program kerja yang akan direncanakan Tahun 2022 ini adalah sebagaimana berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan sub kegiatan;
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah dengan sub kegiatan;
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
3. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan sub kegiatan;
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya
4. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah dengan sub kegiatan;
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan logistic kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan sub kegiatan;
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
6. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

II. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatan Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota dengan sub kegiatan;

- Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan

III. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan sub kegiatan;

- Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa
- Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- Fasilitasi penyusunan profil desa
- Fasilitasi pengelolaan aset desa
- Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa

- Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan

IV. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukumadat yang sama dalam daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan;

- Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang taruna)
- Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi tim penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

Berikut Tabel T-C.33;

RENCANA KERJA 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

T.C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD Persentase penurunan jumlah temuan pemeriksaan Nilai SAKIP DPMD	4	5	6	7	8	9	10
				80				82	
				5%				5%	
01.2.01	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah jenis laporan tahunan yang disusun		6 dokumen	Rp 40.200.000			6 dokumen	Rp 55.000.000
01.2.01.06	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	DPMD Kab. Tanjungbar	6 dokumen tahunan dan 8 laporan triwulan	Rp 40.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 dokumen tahunan dan 8 laporan triwulan	Rp 55.000.000

RENCANA KERJA 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

01.2.02	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan		100%	Rp 3.489.546.448	Dana Transfer Urunum- Dana Alokasi Urunum		100%	Rp 3.550.000.000
01.2.02.01	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	DPMD Kab. Tanjungbar	12 Bulan	Rp 3.339.546.948		12 Bulan	Rp 3.400.000.000	
01.2.02.02	Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah pembayaran honorarium pegawai	DPMD Kab. Tanjungbar	12 Bulan	Rp 149.999.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	Rp 150.000.000	
01.2.05	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase peningkatan disiplin pegawai		100%	Rp 20.400.000		100%	Rp 37.950.000	
01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakatan Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakatan dinas dan atribut kelengkapannya	DPMD Kab. Tanjungbar	51 stell	Rp 20.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	51 stell	Rp 22.950.000	
01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	DPMD Kab. Tanjungbar	3 orang	Rp -	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 orang	Rp 15.000.000	
01.02.06	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Persentase cakupan layanan administrasi umum		100%	Rp 509.885.290		100%	Rp 617.620.000	

RENCANA KERJA 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

01.02.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah lamanya ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMD Kab. Tanggabb	12 Bulan	Rp	2.933.599	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	Rp 7.000.000
01.02.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah lamanya ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPMD Kab. Tanggabb	12 Bulan	Rp	43.999.422	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	Rp 44.000.000
01.02.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor	DPMD Kab. Tanggabb	1200 Kotak	Rp	17.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	Rp 21.420.000
01.02.06.05	Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah lamanya ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMD Kab. Tanggabb	12 Bulan	Rp	40.341.719	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	Rp 41.000.000
01.02.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah lamanya ketersediaan bahan bacaan	DPMD Kab. Tanggabb	1050 exemplar	Rp	4.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	Rp 4.200.000
01.02.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKIPD	Jumlah lamanya ketersediaan dana koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	dalam dan luar Kab. Tanggabb	12 Bulan	Rp	400.560.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	Rp 500.000.000
01.02.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase peningkatan kenyamanan kantor		100%	Rp	79.974.306		100%	Rp 81.500.000

**RENCANA KERJA
2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

01.02.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	DPMD Kab. Tanggabbar	150 lembar	Rp 1.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	150 lembar	Rp 1.500.000
01.02.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran air, listrik dan telepon	DPMD Kab. Tanggabbar	12 Bulan	Rp 63.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	Rp 65.000.000
01.02.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	DPMD Kab. Tanggabbar	12 Bulan	Rp 14.934.306	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	Rp 15.000.000
01.02.09	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor		100%	Rp 125.637.800		100%	Rp 157.500.000
01.02.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas	DPMD Kab. Tanggabbar	3 unit mobil dan 10 unit motor	Rp 96.207.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 unit mobil dan 10 unit motor	Rp 120.000.000
01.02.09.06	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor	DPMD Kab. Tanggabbar	40 unit	Rp 7.430.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40 unit	Rp 7.500.000
01.02.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	DPMD Kab. Tanggabbar	3 unit	Rp 22.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 unit	Rp 30.000.000

RENCANA KERJA 2022

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				Rp 3.281.086.252				Rp 3.785.000.000
2.13.03	Program Fasilitas Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi		13 BKAD	Rp 37.548.818		13 BKAD	Rp 150.000.000	
2.13.03.2.01	Kegiatan Fasilitas kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya		114 Desa	Rp 37.548.818		114 Desa	Rp 150.000.000	
2.13.03.2.01.03	Sub kegiatan Fasilitas pembangunan kawasan pedesaan	Jumlah perbup kawasan pedesaan yang disusun	Kab. Tanjabbar	1 dokumen	Rp 37.548.818	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 dokumen	Rp 150.000.000	
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi		114 Desa	Rp 2.142.862.528		100%	Rp 2.035.000.000	
2.13.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina danawasi penyelenggaraan administrasinya		114 Desa	Rp 2.142.862.528		100%	Rp 2.035.000.000	
2.13.04.2.01.04	Sub kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya	Kab. Tanjabbar	114 desa	Rp 150.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	114 desa	Rp 300.000.000	

**RENCANA KERJA
2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

2.13.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparatur desa yang dibina	Kab. Tanjabbar	43 Kepala desa	Rp 71.568.918	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	171 orang	Rp 495.000.000
2.13.04.2.01.08	Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga kerjasama antar desa	Jumlah BUM desa yang dibina	Kab. Tanjabbar	114 BUM desa	Rp 72.065.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	114 BUM desa	Rp 240.000.000
2.13.04.2.01.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah desa yang mengadakan Pilkades	Kab. Tanjabbar	43 Desa	Rp 1.465.778.610	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15 Desa	Rp 500.000.000
2.13.04.2.01.11	Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan profil desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan profilnya	Kab. Tanjabbar	114 desa	Rp 59.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	114 desa	Rp 100.000.000
2.13.04.2.01.13	Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan aset desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan asetnya	Kab. Tanjabbar	114 desa	Rp 60.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	114 desa	Rp 100.000.000
2.13.04.2.01.15	Sub Kegiatan Fasilitas penetapan dan penguasaan batas desa	Jumlah perbu batas desa yang disusun	Kab. Tanjabbar	40 perbup	Rp 165.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40 perbup	Rp 200.000.000
2.13.04.2.01.18	Sub Kegiatan Fasilitas evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah desa yang dievaluasi perkembangan dan lomba	Kab. Tanjabbar	114 desa	Rp 96.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	114 desa	Rp 100.000.000

RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2022

2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan		100%	Rp 1.100.674.906			100%	Rp 1.600.000.000
2.13.05.2.01			Jumlah desa yang kapasitas kelemahannya di tingkatkan	Kab. Tanjungbar	114 desa	Rp 85.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	Rp 330.000.000
2.13.05.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat hukum adat								
2.13.05.2.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah desa yang difasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	Kab. Tanjungbar	114 desa	Rp 67.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		114 desa	Rp 150.000.000

RENCANA KERJA 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.05.2.01.07	Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa / Kelurahan terbaik dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Tanjabbbar	6 desa/kelurahan	Rp 48.025.000 (PAD)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6 desa/kelurahan	Rp 100.000.000
2.13.05.2.01.09	Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Terlaksananya 10 program pokok PKK	Kab. Tanjabbbar	12 Bulan	Rp 899.999.906	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	Rp 900.000.000
JUMLAH					Rp 7.546.730.096			Rp 8.284.570.000

Kuala Tungkal, 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. MOOR SETYO BUDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19611106 198503 1 003

RENCANA KERJA 2022

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokas	Sasaran	INDIKATOR KINERJA						Pagu Indikatif kebutuhan dana TA.2022	Praktiraan Maju Tahun 2023	Sumber Dana	
				Hasil Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1		3	Meningkatnya kualitas pengelolaan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	80						10	11	12
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA			Presentase penurunan jumlah temuan pemeriksaaan	5%						Rp 4.265.643.844	Rp 4.499.570.000	
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	65								
01.2.0	Kegiatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			Jumlah dokumen tahunan yang disusun	6						Rp 40.200.000	Rp 55.000.000	
01.2.0	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	DPMMD Kab. Tanja bbar	Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja	Jumlah jenis laporan tahunan yang tersedia	6						Rp 40.200.000	Rp 55.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil

**RENCANA KERJA
2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

01.02.06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DPMID Kab. Tanja bbar	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah						Jumlah lamanya ketersediaan dana koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan		Rp 400.560.550	Rp 500.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil
01.02.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan	Persentase peningkatan kenyamanan kantor	100%			Jumlah materi yang tersedia		150 lembar		Rp 1.440.000	Rp 1.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil
01.02.08.01	Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	DPMID Kab. Tanja bbar	Tersedianya jasa surat menyurat					Jumlah lamanya pembayaran air, listrik dan telepon		12 Bulan		Rp 63.600.000	Rp 65.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil
01.02.08.02	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	DPMID Kab. Tanja bbar	Tersedianya jaskomunikasi, sumberdaya air dan listrik					Jumlah lamanya jasa kebersihan kantor yang tersedia		12 Bulan		Rp 14.934.306	Rp 15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil
01.02.08.04	Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DPMID Kab. Tanja bbar	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor											
01.02.09	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Persentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100%							Rp 125.637.800	Rp 157.500.000	

RENCANA KERJA 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

01.02.09.01	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPMID Kab. Tanja bbar	Terpeliharanya kendaraan dinas					Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	3 unit mobil dan 10 unit motor	Rp 96.207.800	Rp 120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
01.02.09.06	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	DPMID Kab. Tanja bbar	Terpeliharanya peralatan kantor					Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	40 unit	Rp 7.430.000	Rp 7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
01.02.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	DPMID Kab. Tanja bbar	Terpeliharanya gedung kantor					Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 unit	Rp 22.000.000	Rp 30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									Rp 3.281.086.252	Rp 3.785.000.000	
2.13.03	Program Pengklatan Kerjasama Desa		Meningkatnya kerjasama desa	Persentase peningkatan desa yang melakukan kerjasama	100%					Rp 37.548.818	Rp 150.000.000	
2.13.03.2.01	Kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa dalam Kabupaten/kota	Kab. Tanja b Barat	Meningkatnya kerjasama antar desa	Persentase peningkatan kerjasama antar desa	100%					Rp 37.548.818	Rp 150.000.000	

RENCANA KERJA 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.0 3.2.01. 01	Sub Kegiatan Fasilitas pembangunan kawasan pedesaan	Kab. Tanja b Barat							Jumlah perbup kawasan pedesaan yang disusun	1 dokumen	Rp 37.548.818	Rp 150.000.000	Dana Transfer Urun-Dana Bagi Hasil
2.13.0 4	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Meningkatnya administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan administrasi	114 Desa						Rp 2.142.862.528	Rp 2.035.000.000	
2.13.0 4.2.01	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya	114 Desa						Rp 2.142.862.528	Rp 2.035.000.000	
2.13.0 4.2.01. 04	Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan desa	Kab. Tanja b Barat	Meningkatnya pengelolaan keuangan desa yang baik	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya	114 desa	Rp 150.450.000	Rp 300.000.000	Dana Transfer Urun-Dana Bagi Hasil					
2.13.0 4.2.01. 05	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Kab. Tanja b Barat	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparatur desa yang dibina	43 Kepala desa	Rp 71.568.918	Rp 495.000.000	Dana Transfer Urun-Dana Bagi Hasil					
2.13.0 4.2.01. 08	Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga kerjasama antar desa	Kab. Tanja b Barat	Meningkatnya keberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	Jumlah BUM desa yang dibina	114 BUM desa	Rp 72.065.000	Rp 240.000.000	Dana Transfer Urun-Dana Bagi Hasil					

RENCANA KERJA 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.0 4.2.01. 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Kab. Tanja b Barat	Terselenggaranya pemilihan kepala desa						Jumlah desa yang mengadakan Pilkades	43 Desa	Rp 1.465.778.610	Rp 500.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil
2.13.0 4.2.01. 11	Sub Kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa	Kab. Tanja b Barat	Terfasilitasinya penyusunan profil desa						Jumlah desa yang melaksanakan penyusunan profil desa	114 desa	Rp 59.900.000	Rp 100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil
2.13.0 4.2.01. 13	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan aset desa	Kab. Tanja b Barat	Meningkatnya pengelolaan aset desa yang baik						Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan asetnya	114 desa	Rp 60.450.000	Rp 100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil
2.13.0 4.2.01. 15	Sub Kegiatan Fasilitasi penerapan dan penegeasan batas desa	Kab. Tanja b Barat	Meningkatnya jumlah desa dengan batas yang jelas						Jumlah perbup batas desa yang disusun	40 perbup	Rp 165.800.000	Rp 200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil
2.13.0 4.2.01. 18	Sub Kegiatan Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Kab. Tanja b Barat	Meningkatnya perkembangan desa						Jumlah desa yang dievaluasi perkembangan dan lomba	114 desa	Rp 96.850.000	Rp 100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil
2.13.0 5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat		Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat						Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang diberdayakan	100%	Rp 1.100.674.906	Rp 1.600.000.000	

RENCANA KERJA 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.0 5.2.01	<p>Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota</p>		<p>Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat</p>		<p>Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan</p>	2.313	<p>Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga yang ada</p>	100%	<p>Rp 1.100.674.906</p>	<p>Rp 1.600.000.000</p>	<p>Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil</p>
2.13.0 5.2.01.03	<p>Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan Masyarakat hukum adat</p>	<p>Kab. Tanja Barat</p>	<p>Meningkatnya kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat</p>				<p>Pembinaan locus desa stunting dan IKKS (Kabupaten Kota Sehat)</p>	40 desa	<p>Rp 85.550.000</p>	<p>Rp 120.000.000</p>	<p>Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil</p>
2.13.0 5.2.01.06	<p>Sub Kegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna</p>	<p>Kab. Tanja Barat</p>	<p>Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna</p>				<p>Jumlah desa yang difasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna</p>	114 desa	<p>Rp 67.100.000</p>	<p>Rp 150.000.000</p>	<p>Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil</p>

RENCANA KERJA 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.0 5.2.01. 06	Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Tanja b Barat	Tertfasilitasinya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					Jumlah desa / keluarga dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	6 desa/kelurahan	Rp 48.025.000	Rp 100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2.13.0 5.2.01. 09	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Kab. Tanja b Barat	Tertaksananya 10 program pokok PKK					Tertaksananya 10 program pokok PKK	12 Bulan	Rp 899.999,906	Rp 900.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
JUMLAH												
										Rp 7.546.730.096	Rp 8.284.570.000	

Kuala Tungkal, 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos
Penbina Utama Muda
NIP. 19611106 198503 1 003

BAB V. PENUTUP

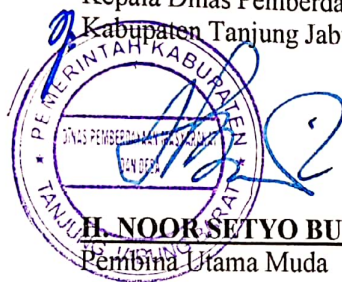
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini dibuat dalam upaya membangun sistem akuntabilitas dan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka untuk penetapan rencana kerja ini diperlukan proses penyusunan konsep dasar pengukuran dan perumusan indikator kinerja.

Keberhasilan dari rencana kerja bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunannya, akan tetapi banyak dipengaruhi implementasi penerapannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang optimal sesuai dengan tujuan RPJMD 2021-2026.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat dengan harapan semoga dapat memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kuala Tungkal, 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19611106 198503 1 003